

MARAKNYA PENGARUH KOMPLEKS POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA

Aldho Faruqi Tutukansa

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan berbagai identitas pada masyarakatnya yang menempati di berbagai pulau. Identitas tersebut tentu rentan terjadinya berbagai isu rasisme hingga adanya isu SARA. Permasalahan tersebut kemudian berimplikasi ke segala aspek, khususnya pada aspek politik. Hal ini yang kemudian beririsan antara isu identitas atau keanekaragaman dengan aspek politik, sehingga timbulnya sebuah isu yang dikenal dengan politik identitas. Isu politik identitas merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini kerap terjadi ketika diadakannya kontestasi politik di Indonesia, seperti pemilihan umum presiden, legislatif, hingga kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota. Permasalahan seperti ini kemudian membuat konsep identitas sosial yang berdampak dengan multikulturalisme hingga politik di Indonesia mulai mengalami persinggungan yang menimbulkan berbagai aspek yang dinilai bertolak belakang. Berbagai konsep yang kemudian dikaitkan pada permasalahan yang akan dianalisis tentu membutuhkan beberapa kasus yang memiliki hubungan antara identitas dengan politik yang terjadi di Indonesia. Kemudian, terdapat juga penjelasan mengenai berbagai pemikiran dan faktor yang menimbulkan politik identitas ini mengakibatkan berdampak ke lingkungan masyarakat luas. Sehingga, maraknya pengaruh politik identitas ini membuat persepsi masyarakat semakin kompleks dan menimbulkan pro dan kontra hingga mengkhawatirkan terjadinya perpecahan, baik antar masyarakat maupun satu sama lain.

Kata Kunci: Indonesia, Politik, Identitas, Sosial, Masyarakat

ABSTRACT

Indonesia is a country that is rich in various identities for its people who live on various islands. This identity is certainly vulnerable to various issues of racism to the existence of racial issues. These problems then have implications for all aspects, especially in the political aspect. This then intersects between the issue of identity or diversity with the political aspect, resulting in an issue known as identity politics. The issue of identity politics is one of the problems that often occurs in various countries, including Indonesia. This often happens when political contestations are held in Indonesia, such as general elections for the president, legislature, and heads of provinces and districts/cities. Problems like this then create the concept of social identity which has an impact on multiculturalism so that politics in Indonesia begins to experience intersections that give rise to various aspects that are considered contradictory. Various concepts which are then linked to the problems to be analyzed certainly require several cases that have a relationship between identity and politics that occurs in Indonesia. Then, there is also an explanation of the various thoughts and factors that lead to this identity politics resulting in an impact on the wider community. Thus, the rampant influence of identity politics

makes people's perceptions more complex and raises pros and cons to worry about divisions, both between communities and one another.

Keywords: *Indonesia, Politics, Identity, Social, People*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pada saat ini memang dikenal dengan negara yang bersifat majemuk dan memiliki keanekaragaman terhadap suku, etnis, agama, ras, dan kebudayaan. Keanekaragaman masyarakat di Indonesia yang membuat seluruh individu yang harus bisa beradaptasi antara satu sama lain. Akan tetapi, keranekaragaman masyarakat Indonesia juga rawan terjadinya konflik maupun perselisihan terkait SARA, sehingga beberapa orang pun bisa terpengaruh dengan terjadinya konflik tersebut.

Selain itu, konflik-konflik yang kerap terjadi di berbagai elemen masyarakat ini memiliki sebab. Terkadang, penyebab terjadinya konflik-konflik yang berhubungan dengan keanekaragaman masyarakat lebih ke arah kepentingan politik tertentu. Seperti halnya terjadi di Indonesia ketika salah satu kandidat dalam suatu pemilihan yang terus menerus memberi ujaran kebencian dengan menyebarkan berita-berita bohong yang memuat isu SARA. Hal inilah yang secara tidak langsung, tindakan tersebut telah menjadi salah satu permasalahan pada Politik yang berhubungan dengan identitas pada masyarakat.

Contoh menguatnya masalah politik identitas yaitu dalam pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Dalam pemilihan gubernur ini, terdapat dua kandidat pasangan calon yang bertarung antara Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan – Sandiaga Uno. Menguatnya politik identitas ini disebabkan terjadinya pertarungan yang berasal dari latar belakang suku, ras, dan agamany masing-masing, seperti Basuki Tjahaja Purnama

yang berlatar belakang dari kelompok minoritas Tionghoa dan non-muslim menghadapi Anies Baswedan yang berlatar belakang dari kelompok mayoritas Jawa dan agama Islam. Apalagi, ketika diduganya Ahok (nama panggilan Basuki Tjahaja Purnama) melakukan penistaan agama dengan pernyataannya terhadap Surat Al-Maidah ayat 51. Hal inilah yang makin kuatnya terhadap isu SARA yang mempengaruhi munculnya politik identitas

Lalu, istilah politik identitas ini mulai berkembang dengan berbagai penjelasan yang berbeda dari kalangan masyarakat, namun arah yang ditujui menjadi satu gagasan, seperti penyebutan politik identitas dengan politik perbedaan, politik pengakuan, dan politik multikulturalisme. Maka, dapat didefinisikan sebuah alat politik pada suatu kelompok seperti etnis, suku, agama, budaya, dan lainnya dalam tujuan tertentu.

Kemudian, ada salah satu ungkapan yang mengatakan bahwa “Semua politik adalah politik identitas.” Ungkapan tersebut pada zaman saat ini kerap muncul dalam menggambarkan suatu fenomena politik kontemporer dunia khususnya kondisi pada politik di Negara Indonesia pada saat ini. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga berbagai negara-negara di belahan dunia pun mengalami hal yang serupa.

Sehingga, fenomena politik identitas ini memberikan dampak yang besar terhadap berbagai dinamika sosial-politik dengan munculnya berbagai kelompok pergerakan sosial. Fenomena menguatnya permasalahan politik identitas ini, bukan hanya menjadi salah satu isu lokal, melainkan telah menjadi salah satu isu nasional hingga isu internasional.

Dengan demikian, dalam mengkaji pada permasalahan mengenai politik identitas ini dapat memberi ketertarikan terhadap penulis maupun pembaca. Ketertarikan tersebut berasal dari berbagai alasan yang menjadi hal yang lebih mendasari terhadap pentingnya dalam melakukan pengkajian terhadap politik identitas tersebut. Alasan yang pertama yaitu, Negara Indonesia yang dikenal dengan negara multikultural atau negara plural yang memiliki keragaman etnis, suku, ras, agama, maupun Bahasa yang menjadi potensi dalam membentuk suatu perilaku politik kontemporer pada masa kini. Alasan yang kedua bahwa Negara Indonesia pada saat ini masih berada dalam proses transisi menuju demokrasi. Kehadiran demokrasi tersebut dapat menjadi peluang pada permasalahan politik yang rentan untuk dibajak oleh kelompok manapun. Alasan yang ketiga yaitu, isu-isu mengenai politik identitas dapat menandai adanya berbagai praktik dalam berpolitik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok terpinggir melalui perjuangan hingga perlawanan terhadap berbagai bentuk diskriminasi. Dari berbagai alasan tersebut yang membuat berbagai elemen masyarakat yang seolah-olah mereka mulai penasaran terhadap politik identitas yang berkembang di Indonesia saat ini. Berdasarkan uraian terhadap latar belakang tersebut, hal ini dapat dijadikan sebagai alasan penting dalam menganalisis dan mengkaji secara mendalam terhadap politik identitas ini. Kemudian, topik paper yang diberikan dengan berjudul "Pandangan Masyarakat Terhadap Adanya Politik Identitas."

B. Tujuan Masalah

Tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan tentang dinamika politik identitas yang sering timbul di Negara Indonesia, serta untuk memberikan berbagai ilmu dan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam memahami peristiwa

pada politik identitas yang sering terjadi di sekitar masyarakat.

C. Manfaat

- Manfaat Teoritis
Paper ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman terhadap perkembangan isu dalam bidang politik dan sosial budaya.
- Manfaat Praktis
Paper ini dapat memberikan fakta-fakta yang muncul di lapangan terhadap permasalahan isu-isu politik identitas di Indonesia.

D. Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan menjelaskan berbagai kajian teori tentang Identitas sosial, politik Indonesia, dan teori tentang multikulturalisme.

1. Teori Identitas Sosial

Salah satu teori yang memiliki hubungan yang erat dalam pemaparan ini adalah Teori identitas sosial. Teori ini mulai diciptakan dan dirumuskan oleh para tokoh sosiologi yang bernama Henri Tajfel dan John Turner pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Kemudian, ada dua pendapat yang menjelaskan tentang pengertian terhadap identitas sosial ini.

Menurut (1) berpendapat bahwa identitas sosial adalah suatu bagian dari konsep yang melekat pada seseorang berdasarkan pengetahuan dari sebuah individu tersebut dengan meningkatkan kesetaraan terhadap nilai dan emosional tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial secara bersamaan.

Selain itu, mengutip dari John Turner dan Oakes yang berpendapat juga bahwa konsep identitas sosial adalah salah satu bagian dari jalannya sebuah mekanisme interaksi terhadap sosial-psikologis dan juga menunjukkan bahwa ilmu individualistik tidak perlu dijadikan terhadap permasalahan sosial-psikologis tersebut (2).

Dengan demikian berdasarkan uraian dari atas, dapat disimpulkan bahwa teori yang kesesuaiannya lebih kuat yaitu berdasarkan pada teori yang dinyatakan oleh Henri Tajfel yang menjelaskan bahwa identitas sosial adalah suatu konsep dalam pengetahuan pada diri individu anggota kelompok terhadap keanggotaan yang telah sesuai dalam suatu kelompok sosial. Sehingga, teori identitas sosial ini dapat menunjukkan terhadap perilaku kelompok terhadap suatu perilaku sosial dan dapat dipandang juga bahwa adanya suatu interaksi antara proses psikologis dan sosial yang bersifat fungsional.

Berkaitan dengan hal tersebut, Faktor maupun penyebab yang dikemukakan oleh Jackson dan Smith yang berhubungan dengan identitas sosial dapat dibagi menjadi empat faktor, yaitu:

- a. Terdapat persepsi antar kelompok
Intinya, status dan gengsi yang berada dari kelompok tersebut dapat memberikan suatu pengaruh pada persepsi dalam setiap individu tersebut dengan mengidentifikasi dirinya dari sebuah kelompok yang berhubungan.
- b. Menimbulkan daya tarik *in-group*
Maksudnya, *in-group* dapat didefinisikan pada suatu kelompok yang individu tersebut memiliki perasaan serta adanya identitas pada umumnya. Jadi, daya Tarik ini akan menimbulkan yaitu *in-group bias*, di mana munculnya kecenderungan pada kelompok sendiri yang dianggap lebih baik.
- c. Saling berkaitan pada keyakinan
Inti dari konsep ini yaitu akan adanya saling berhubungan antara emosional terhadap kelompok sosial tersebut. Munculnya dari sikap ini disebabkan dengan keterkaitan dalam keberadaannya secara sadar sebagai salah satu anggota dari suatu kelompok yang diketahui.
- d. Depersonalisasi

Keberadaan ini muncul ketika salah satu individu dari kelompok yang telah menjadi anggota dari kelompok tersebut, dalam dirinya dapat menerapkan nilai-nilai yang dimiliki oleh diri sendiri serta nilai-nilai dari kelompok yang diikuti dapat digunakannya berdasarkan kesesuaian terhadap keberadaan nilai-nilai dari kelompok tersebut. Akan tetapi, di sisi lainnya dikarenakan dengan adanya kekhawatiran dalam kelompoknya yang tidak dianggap sebab individu tersebut telah mengabaikan dan meninggalkan ciri khas yang berasal dari kelompok tersebut (3)

Kemudian, dapat dikatakan bahwa identitas sosial juga dalam mengelompokan pada diri kita masing-masing merupakan salah satu fokus berdasarkan identitas pada personal dan masyarakat sekitar melalui persepsinya. Intinya adalah berdasarkan dari individu ketika bergabung atau mengikuti suatu kelompok dapat dinyatakan sebagai salah satu komponen utama dalam teori identitas sosial (4).

2. Multikulturalisme

Di sini, perlunya lagi pemahaman terhadap masalah tentang Multikulturalisme yang pastinya masih memiliki hubungan terhadap paper yang disajikan ini. Multikulturalisme merupakan suatu kebudayaan yang bersifat majemuk atau dalam suatu negara memiliki kenekaragaman baik suku maupun budaya yang berada di sekitar kita.

Hal inilah menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Negara Indonesia hingga pada saat ini. Pada kenyataannya, Multikulturalisme ini salah satu hal yang tidak bisa dihindari begitu saja oleh Masyarakat yang berada di Negara Indonesia ini. Hal tersebut disebabkan bahwa Negara Indonesia kini memiliki ratusan Bahasa, ratusan suku, enam agama beserta kepercayaan

lainnya, hingga puluhan ribu pulau-pulau. Sehingga, Negara Indonesia juga rentan akan terjadinya konflik maupun perselisihan baik antar suku, ras, budaya, maupun agama.

Selain itu, salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap Multikulturalisme ini adalah letak geografis yang terdapat di Negara Indonesia. Faktor inilah yang memiliki pengaruh terhadap persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia yang masih perlu ditingkatkan kembali. Oleh sebab itu, masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seharusnya dapat dijadikan sebagai dorongan untuk meningkatkan nilai-nilai pluralitas dan rasa persaudaraan yang dapat mewujudkan Negara Indonesia yang Bersatu, berdaulat, adil, dan Makmur demi membangun negara kebangsaan yang dapat menjalankan perikemanusiaan dan keadilan sosial untuk seluruh Rakyat Indonesia (5)

3. Konsep Politik di Indonesia

Secara umum, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang negara dan kekuasaan. Ilmu politik ini dapat ditemui dari berbagai literatur yang lebih banyak tentang pengantar ilmu politik serta sistem politik itu sendiri. Kemudian, hingga saat ini memiliki golongan-golongan berdasarkan pada segi dari ilmu politik tersebut. Golongan tersebut di antaranya:

- Segi pendekatan kekuasaan politik,
- Segi tingkah laku politik,
- Segi sistem dan lembaga politik,
- Segi proses dan kehidupan politik.

Hal tersebut sudah berdasarkan definisi penjelasan tentang ilmu politik yang berasal dari ilmuwan politik, Prof. Dr. J. Barents dari bukunya yang berjudul "*Ilmu Politika*". Lalu penyebab adanya ilmu politik ini karena adanya kesesuaian dalam memenuhi kebutuhan terhadap jalannya suatu pemikiran dan sebagai bagian dari pengantar yang bersifat sangat luas dalam berbagai aspek khususnya di bidang politik (6).

Pada dasarnya, politik ini adalah suatu fenomena yang selalu berhubungan terhadap suatu manusia dalam kehidupan masyarakat yang cenderung bersifat dinamis dan dalam masa perkembangan. Maka, dalam proses berkembang, salah satu gejala yang selalu membangun jati diri pada manusia adalah politik. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu faktor utama dalam menggerakkan dan mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan politik yaitu manusia.

Oleh karena itu, konsep-konsep tentang politik tersebut memiliki berbagai bentuk-bentuknya, di antaranya kebijaksanaan dan hukum yang dijadikan sebagai sarana dalam mengatur masyarakat, cita-cita yang hendak diwujudkan, kelompok yang dijadikan sebagai pihak yang berkepentingan, dan lembaga yang melaksanakan berdasarkan konsep tersebut (7).

Berdasarkan dari uraian terhadap konsep atau landasan teori tersebut, maka dapat dipastikan bahwa konsep-konsep yang disampaikan ini memiliki hubungan yang sangat erat terhadap kasus permasalahan tentang politik identitas ini. Lalu, dampak terhadap politik identitas ini memberikan dampak yang dapat berubah secara signifikan, seperti halnya ketika salah satu tokoh yang mengemukakan pemikiran politiknya dengan membawa isu baik isu SARA maupun masalah pribadi dari orang yang dikatakannya. Hal ini bisa dikategorikan ke dalam politik identitas yang bisa membawa dampak negatif. Oleh karena itu, landasan teori yang telah diberikan dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber dalam menjelaskan topik paper yang sedang dianalisis ini.

2. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Sebuah pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan kajian literatur atau studi pustaka. Studi pustaka adalah penelitian melalui kajian teoritis,

penelusuran referensi, dan kajian literatur lainnya seperti buku, jurnal, catatan, dan studi kasus yang memiliki hubungan dengan nilai, norma, dan budaya terhadap situasi sosial kini mengalami perkembangan (8). Pendekatan yang akan dilakukan oleh penulis ini membutuhkan tiga belas sumber yang terdiri enam buku dan tujuh jurnal yang dapat dijadikan sebagai sumber pustaka dalam melakukan penelitian ini. Hal tersebut karena penelitian ini akan lebih menganalisis lebih dalam terhadap permasalahan yang memiliki hubungan yang mengikat terhadap topik paper ini.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan bersifat kualitatif. Namun, lebih spesifiknya metode ini akan menggunakan sumber melalui studi pustaka. Hal tersebut bertujuan yang didasari oleh peneliti untuk mengumpulkan berbagai informasi dan materi yang memiliki hubungan terhadap topik paper ini yang sedang dianalisis. Studi pustaka dilakukan berupa teknik dalam mengumpulkan berbagai data dengan menganalisis terhadap buku, literatur, maupun jurnal yang diperoleh serta bisa dijadikan sebagai resolusi dalam memecahkan suatu masalah dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hasil

Berdasarkan dari buku, jurnal, dokumen, dan literatur lainnya yang telah dibaca dan dianalisis, maka dapat diketahui bahwa Politik Identitas ini termasuk ke dalam salah satu taktik politik yang mulai hangat dan beredar di tengah masyarakat seluruh Indonesia. Hal tersebut karena situasi perpolitikan pada negara ini telah masuk dalam tahap mulai yang mengenal dengan hal-hal yang bersifat identitas seperti memainkan isu suku, agama, etnis, budaya, hingga

golongan demi memenuhi kepentingan pada politik tersebut untuk menjatuhkan lawan. Namun, lebih mendalam lagi, ada berbagai pendapat dan argument yang disampaikan oleh para ahli dalam menjelaskan dan menyikapi terhadap terjadinya politik identitas di masa kini.

Salah satu pakar ahli politik asal Universitas Duken, Donald L Horowitz berpendapat bahwa politik identitas diibaratkan dengan siapapun yang akan diterima dan siapapun yang akan ditolak melalui penentuan dalam pembagian garis tegas. Garis tegas tersebut sebagai penentu yang bersifat permanen dan dapat berakibat status sebagai anggota dan bukan anggota tidak dapat berubah dan bersifat tetap.

Lalu, masih banyak sekali para ahli dalam menyikapi permasalahan ini. Cressida Heyes juga menyatakan bahwa politik identitas merupakan politik yang memiliki penjelasan yang bersifat lebih luas dengan menimbulkan tanda-tanda tindakan yang bersifat politis serta politik identitas ini dikategorikan sebagai salah satu teori yang dialami oleh masyarakat atau anggota-anggota berasal dari daerah, kelompok, golongan, dan organisasi sosial tertentu dalam menghadapi persoalan yang menimbulkan adanya rasa ketidakadilan berdasarkan pengalaman yang mereka dapat.

Kemudian, Lukmantoro juga memberikan asumsi bahwa salah satu kepentingan politik yang didepankan oleh berbagai anggota-anggota dari suatu kelompok yang disebabkan dengan memiliki karakteristik dan identitas yang sama, baik pada posisi ras, etnisitas, gender, maupun agama. Selain itu juga, politik identitas bisa disebut dengan politik perbedaan.

Hal tersebut dapat dicermati melalui berbagai tindakan-tindakan yang bersifat politis dengan berupaya mendapatkan aspirasi demi penguasaan persebaran nilai-nilai yang dilihat bersifat fundamental dan mempengaruhi dalam pembuatan

suatu kebijakan yang dapat berimbas pada dasar primordialisme, seperti pada konteks secara etnis, upaya tersebut dicampur adukkan ke dalam kebijakan peraturan daerah yang menyebabkan adanya dorongan keinginan untuk mendirikan otonomi khusus yang berakibat berdirinya Gerakan separatis dan secara agama, upaya yang dapat memasukan nilai-nilai agama yang menyebabkan terbentuknya peraturan daerah Syariah yang berakibat terjadinya perselisihan antar agama karena hal itu telah membuat pada daerah tersebut diidentikan sebuah daerah hanya untuk agama tertentu (9).

Selain itu, menurut Prof Ahmad Syafii Maarif (10) Politik Identitas terkadang tidak memberikan dampak yang berbahaya terhadap keutuhan bangsa dan negara di masa yang akan datang dalam berbagai jenis apapun, selama rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia, semangat Sumpah Pemuda yang telah menyatukan dan mengurangi rasa sentimen antar suku dan etnis, serta meningkatkan rasa penghayatan dan pelaksanaan terhadap pengamalan Pancasila sebagai filosofi bangsa secara serius, sungguh-sungguh, dan penuh dengan tanggung jawab.

Setelah melihat dari berbagai pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang telah disajikan, maka dapat diketahui bahwa sangatlah wajar terdapat berbagai pendapat yang berbedabeda berdasarkan pandangan yang mereka sampaikan dan yang mereka ketahui. Akan tetapi, adapun pendapat yang dinilai mendukung dengan munculnya politik identitas di tengah masyarakat ini. Pendapat tersebut yaitu pandangan dari Ahmad Syafii Maarif. Beliau mendukung dengan adanya politik identitas dengan bersyarat selama aktivitas politik tersebut tidak memberikan dampak yang berbahaya bagi masyarakat Indonesia serta aktivitas politik tersebut dilaksanakan secara kebersamaan dan persaudaraan tanpa memecah belah antar

suku, antara agama, dan antar masyarakat.

Akan tetapi, ada juga pendapat yang tidak setuju bahkan menentang dengan maraknya politik identitas di berbagai negara. Pendapat tersebut berasal dari Cressida J Heyes dan Lukmanto, walaupun kedua di antara mereka menentang dengan maksud memiliki pandangan yang berbeda. Berdasarkan dari pendapat yang dikemukakan oleh Cressida J Heyes dinilai menentang terhadap politik identitas yang disebabkan memunculkan tanda-tanda aktivitas politik yang memberikan dampak yang merugikan hingga mengakibatkan munculnya ketidakadilan antar masyarakat dan antar golongan.

Tidak lupa juga dengan pendapat yang berasal dari Lukmanto yang menilai bahwa politik identitas dapat disebut dengan politik perbedaan dan tindakan politis tersebut dapat memberikan pengaruh dengan munculnya sikap primordialisme dan etnosentrisme. Hal tersebut dikarenakan munculnya sikap tersebut berasal dari kebijakan yang ditetapkan oleh suatu wilayah, di mana para pembuat kebijakan tersebut telah terpengaruh dari sifat yang mereka miliki seperti primordialisme yang dapat menimbulkan perpecahan, seperti berimbas dengan munculnya Gerakan separatisme, terorisme, dan mendorong untuk melakukan intervensi terhadap golongan lain yang mereka menganggap sebagai musuh dari golongannya.

Dan yang terakhir, pendapat yang dikemukakan oleh Donald L Horowitz yang dinilai berada di posisi netral dalam menyikapi maraknya politik identitas tersebut yang mengibaratkannya seperti garis tegas sebagai pembagi terhadap status anggota dari identitas tersebut. Hal tersebut berdasarkan pernyataannya yang dilihat tidak memihak ke posisi baik mendukung maupun menentang, akan tetapi hanyalah sebagai penjelas terhadap

politik identitas yang sedang hangat di kalangan masyarakat kini.

Dengan demikian, hasil yang disajikan dengan pembagian pendapat yang disajikan berdasarkan pandangan dari para ahli yang berbeda-beda. Memang, polemik permasalahan ini juga saat ini telah meluas dan berada di sekitar masyarakat maupun di sekitar lingkungan kita.

B. Pembahasan

1. Politik Identitas

Secara luas, politik identitas memiliki berbagai istilah lain dalam menyebutkannya disertai dengan makna yang sama, yaitu politik perbedaan atau bisa disebut juga politik multikulturalisme. Sebab, penyebutan pada istilah tersebut memang memiliki keterkaitan yang sangat spesifik dengan bagian-bagian dalam politik identitas tersebut, serta pemberian istilah lain pada politik identitas juga termasuk salah satu dorongan untuk meningkatkan perjuangan dari identitas yang dibawa ke dalam permasalahan politik tersebut (11).

Maka, dapat diperjelas bahwa politik identitas merupakan salah satu tindakan politik yang didasari dengan strategi dengan membawa berbagai simbol-simbol identitas yang digunakan sebagai senjata utama dalam melaksanakan praktik politik seperti menguatkan argumentasi, mematahkan argumentasi lawan, hingga menjatuhkan lawan politik, seperti membawa isu kultrural, isu etnisitas, dan isu-isu lainnya.

2. Gagasan dan Faktor terhadap Politik Identitas

Banyaknya identitas yang berada di berbagai lingkungan membuat terjadinya hal-hal yang memungkinkan rentan terjadi konflik yang disebabkan hanya permasalahan tentang perbedaan. Hal itulah yang sering terjadi berada di sekitar kita dan perlunya gagasan dalam menyikapi perkembangan politik identitas ini. Pada bagian ini, perlunya hubungan

untuk saling berinteraktif terhadap perbedaan antar golongan maupun antar kelompok, seperti antar etnis, antar suku, antar agama, hingga antar ras yang dapat disebut dengan menumbuhkan sikap toleransi.

Sikap toleransi dapat dikategorikan sebagai salah satu gagasan dalam menghadapi perkembangan politik identitas pada saat ini. Sikap toleransi tersebut dapat diterapkan di berbagai bidang seperti toleransi politik, toleransi budaya, toleransi sosial, dan lainnya. Sikap toleransi dalam berpolitik ini memungkinkan dapat diterapkan di negara yang penduduknya memiliki berbagai identitas yang berbeda atau negara majemuk (multikulturalisme) dan juga dapat diterapkan di negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis (12).

Lalu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam menanamkan sikap toleransi politik dapat disebutkan yaitu faktor pada psikologi politik, penerapan sistem politik, struktur politik yang kokoh, serta meningkatnya kemakmuran perekonomian dari negara tersebut.

3. Hal-hal yang berhubungan terhadap Politik Identitas di Indonesia

a) Perseteruan antara Nasionalisme dan Agama

Seperti yang diketahui bahwa beragam isu-isu politik identitas yang terjadi hanya karena berasal dari keinginan dari tiap masyarakat berdasarkan pemikirannya sendiri. Hal itu terjadi di Indonesia, di mana ada dua kubu masyarakat yang melakukan perselisihan terhadap pemikiran yang mereka miliki, yaitu antara masyarakat yang mengusung identitas nasionalisme dengan yang mengusung identitas agama. Padahal, landasan keagamaan merupakan sebagai bukti dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dan telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam terbentuknya landasan negara Indonesia yaitu Pancasila yang terdapat pada sila ketuhanan.

Kemudian, pemikiran nasionalisme ini dapat diartikan sebagai semangat jiwa kebangsaan dan cinta tanah air. Di Indonesia, nasionalisme dapat dikategorikan sebagai jiwa persatuan dan kesatuan antar suku, agama, ras, etnis, golongan, dan sebagainya. Hal itu dibuktikan ketika pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana mereka bersatu teguh dan bekerja sama untuk melawan para penjajah yang ingin menguasai wilayah Indonesia tersebut. Sampai akhirnya, mereka bisa bekerja sama dengan baik hingga terciptanya kemerdekaan Indonesia. Namun, saat ini perlu diketahui bahwa nasionalisme lebih digaungkan oleh kumpulan dari kaum minoritas yang merasa tertindas dan terintimidasi (13).

Akan tetapi, perseteruan ini terjadi disebabkan hanyalah kepentingan dari elit-elit politik yang lebih mementingkan urusan politiknya demi merebut maupun mempertahankan sebuah kekuasaan di negara tersebut. Hal itu mereka lakukan dengan cara menggunakan identitas keagamaan yang dijadikan sebagai alat propaganda politik dan perebutan kekuasaan. Dengan begitu, akan berakibat ke dalam hal-hal yang hanya dijadikan alat saja atau memanipulasi masyarakat Indonesia melalui propaganda mereka yang gaungkan.

Biasanya, isu-isu ini lebih sering terjadi pada masa pemilihan umum yang merupakan sebagai kesempatan bagi di antara mereka untuk berani menyuarakan terhadap senjata utama yang mereka bawa yaitu melakukan penggiringan opini tentang identitas lawan demi menjatuhkan lawan dari politik. Hal ini yang kemudian berdampak terjadinya perpecahan antara identitas nasionalisme dan keagamaan yang dapat merusak nama baik ideologi Pancasila.

b) Politik Identitas di Aceh

Aceh merupakan salah satu provinsi yang berada di wilayah ujung barat Indonesia. Bahkan, Aceh juga disebut

sebagai “serambi mekah” di Indonesia karena landasan dan hukum yang berlaku di Provinsi Aceh adalah hukum syariat Islam. Maka dapat diketahui bahwa masyarakat Aceh lebih condong ke pemikiran keagamaan yaitu hukum keagamaan Islam.

Pada awalnya, Aceh pernah menginginkan untuk berdiri sendiri karena Aceh sejak awal memiliki wilayah tersendiri yaitu Kesultanan Aceh. Akan tetapi, Kesultanan Aceh mulai tergoyah dan bubar pada tahun 1903 karena telah menyerah kepada Hindia Belanda. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1976 Aceh melakukan Gerakan separatis untuk melawan negara Indonesia dengan membentuk Gerakan Aceh Merdeka.

Gerakan ini didirikan oleh Tengku Hasan Di Tiro yang beranggapan bahwa Pemerintah Indonesia yang mengeluarkan kebijakan dalam bentuk pendekatan militeristik, menganggap bahwa masyarakat Aceh merasa tidak puas dengan Pemerintahan Indonesia, dan kekecewaan rakyat Aceh karena wilayah mereka tidak diperhatikan oleh Pemerintah pada masa Orde Baru. Hal inilah yang membuat situasi politik di Indonesia kian memanas ketika adanya Gerakan separatisme yang dibentuk oleh Aceh demi mendapatkan kemerdekaannya. Serta, adanya dorongan masyarakat Aceh untuk berdiri sendiri karena merasa daerahnya sudah memenuhi untuk dijadikan sebagai negara (14)

Hal ini dapat dijadikan sebagai alasan bahwa Aceh juga pernah menggunakan kekuatan politik identitasnya yang didasari dari agama, etnis, dan masyarakat Aceh yang merasa tidak sesuai dengan harapan Indonesia di masa Orde Baru. Bahkan, masyarakat Aceh tersebut merasa telah memiliki jiwa nasionalisme terhadap wilayahnya sendiri. Namun, perlu diketahui berdasarkan yang disampaikan oleh Anderson yang menyatakan bahwa nasionalisme diibaratkan seperti salah satu komunitas, di

mana komunitas tersebut meskipun adanya eksploitasi, tetapi jiwa kebangsaannya dilihat sebagai persaudaraan yang mendalam (15) Pendapat tersebut juga berkaitan dengan permasalahan politik identitas di Aceh ketika di wilayahnya merasa dieksploitasi oleh Pemerintah Indonesia Era Orde Baru, mereka merasa terdorong dengan meningkatnya jiwa nasionalisme dan kesatuan masyarakat Aceh.

c) Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017

Pada bagian ini merupakan salah satu politik identitas yang bisa dikatakan sangat menonjol sekali. Hal itu dapat disebut ketika menguatnya politik identitas di wilayah lokal menimbulkan Gerakan-gerakan politik yang sangat jelas, seperti halnya dengan menggunakan isu penggiringan opini demi mencapai keberhasilannya dalam memenangkan pemilihan umum untuk memegang kekuasaan (16).

Kejadian ini dilatarbelakangi ketika salah satu calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang berlatarbelakang sebagai kaum minoritas dari etnisnya dan agamanya. Hal itulah yang kemudian membuat kejadian hal-hal yang tidak lazim, yaitu dengan memainkan isu SARA untuk menjatuhkannya dan menurut saya, politik identitas yang dimainkan termasuk dalam budaya perpolitikan yang tidak sehat yang dapat membawa perpecahan yang terjadi bukan hanya di Jakarta, tetapi akan berdampak ke seluruh Indonesia.

4. KESIMPULAN

Politik Identitas atau politik multikulturalisme merupakan salah satu tindakan politik yang menggunakan strategi dengan membawa simbol-simbol identitas sebagai senjata utama dalam menghadapi lawan politik. Memang berbagai pendapat para ahli yang mengatakan hal-hal yang berhubungan dengan politik identitas. Namun, politik ini

juga tidak lepas dengan sisi positif dan sisi negatif yang dimiliki. Kemudian, gagasan yang perlu ditanamkan pada diri kita dalam menghadapi politik identitas yaitu sikap toleransi. Dengan sikap tersebut, maka tindakan kita akan menciptakan suasana kondusif, damai, dan tenteram, apalagi di lingkungan sekitar kita merupakan daerah yang majemuk. Serta, toleransi juga dihubungkan dengan permasalahan juga dipengaruhi dari berbagai faktor-faktor politik. Lalu, melihat dari tindakan politik identitas yang terjadi di Indonesia membuat kita dapat berpandangan bahwa memang banyak sekali permasalahan dan dampak yang timbul akibat melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, pandangan masyarakat menilai bahwa politik identitas lebih membawa arah negatif dan dapat menimbulkan perpecahan antar golongan. Akan tetapi, ada juga sikap positif dalam menghadapi tindakan politik tersebut dengan menumbuhkan sikap toleransi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Tajfel H. Social identity and intergroup behaviour. *Social Science Information*. 1974 Apr 3;13(2):65–93.
2. Utami FN, Silalahi BY. Hubungan Antara Identitas Sosial dan Konformitas Pada Anggota Komunitas Virtual Kaskus Regional Depok. Vol. 5. p. 94.
3. Sarifah R. Identitas Sosial Dengan Prasangka Pada Prajurit TNI AD Terhadap Anggota Kepolisian. *Jurnal Ilmu Psikologi Terapan*. 04(01):78–9.
4. Hafizhudin Z. Hubungan Antara Identitas Sosial Dengan Perilaku Mengemudi Agresif Pada Komunitas Motor Rx-King Di Semarang. Vol. 5. 2016.

-
5. Shofa AM. Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dlam Bingkai Pancasila. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. 1(1):34–5.
6. Papasi J. Ilmu Politik Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu;
7. Nambo AB, Puluhuluwa MR. Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik. *Jurnal Mimbar*. XXI(2):262–4.
8. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D [Internet]. Bandung: Alfabeta; Available from: <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/>
9. Nasrudin J, Nurdin AA. Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). Hanifiya: *Jurnal Studi Agama-Agama*. 2019 Feb 25;1(1):34–47.
10. Maarif AS. Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina;
11. Afala LM. Politik Identitas di Indonesia. Malang: UB Press;
12. Habibi M. Identity Politics in Indonesia. Available from: <https://www.researchgate.net/publication/315338050>
13. Lestari YS. Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama. *Journal of Politics and Policy*. 1(1):26–7.
14. Gayatri IH. Tarik Ulur Keindonesiaan dan Keacehan. In: Rozi S, Noor F, Gayatri IH, Pabottingi M, Widjojo MS, editors. *Politik Identitas*. Jakarta: PT Bumi Aksara; p. 46–7.
15. Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. New York: Verso;
16. Haboddin M. Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal. *Journal of Government and Politics* [Internet]. 2012 Feb 1;3(1):109–26. Available from: <http://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/view/152>

Click or tap here to enter text.